

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Jakarta: Konsitusi Press, 2020
- Basyar, Abdul Hakim. *Relevansi Kualitas Birokrasi dengan Penerapan Manajemen Kinerja*, 2018.
- Brotodirejo, Soebroto. *Polri Sebagai Penegak Hukum*. Bandung: Sesimpol, 1989.
- Daeng Naja, H. R. *Dewan Perwakilan Daerah: Bikameral Setengah Hati*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2004.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. St. Paul, MN: West Group, 1999.
- Huda, Ni'matul, dan Nazriyah. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: CV Hikam Media Utama, 2020.
- Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Piliang, Indra J., dan Bivitri Susanti. *Untuk Apa DPD RI*. Jakarta: Kelompok DPD di MPR RI, 2007.
- Pramodhawardani, Jaleswari, dan dan Mufti Makaarim. *Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit*, Jakarta: IDSPS Press, 2009.
- Purwoto, Ady., dkk. *Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta: Adikara Cipta Aksa. 2025
- Rahardjo, Satjipto. *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2002.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1998.
- Rispalman, dkk. *Kewenangan DPD RI Sebagai Lembaga Negara Legislatif*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2024.

- Rudy. *Konstitusionalisme Indonesia Buku I: Dasar dan Teori*. Lampung: PKKPUU FH Unila, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Suryawan, I Gutsi Bagus. *Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2020.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Suwandoko. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018.

Jurnal-Jurnal

- Abdurahman, Ali, dkk. "Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 4, no. 1 (2022): 40–53.
- Adelina, Fransisca. "Legalitas Penunjukan Pejabat Polri Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Pada Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018).
- Adhiwira, Adrianus, dkk. "Analisis Yuridis Kedudukan Jabatan Anggota Polri Aktif di Luar Institusi Polri di Tengah Isu Dwi-Fungsi Polri." *Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 3 (2021).
- Amelia, Vivi Indra, dkk. "Kompetensi Manajerial Pejabat Pengawas dalam Perspektif Pejabat Pelaksana." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 14, no. 1 (2024).

- Arifin, Zaenal, dan Adhi Putra Satria. “Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab, dan Solusi.” *Jurnal Pro Hukum* 9, no.1 (2020).
- Budiyono. “Counterterrorism in Indonesia: The Police Role in Ensuring Security.” *Pakistan Journal of Criminology* 16, no. 1 (2024): 733–741.
- Diva, Cintya, dkk. “Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 3, no. 6 (2024).
- Fanggi, Prandy A. L. “Analisis Konseptual Stufenbau Theory terhadap Tata Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Jurnal Rekomendasi Hukum* 1, no. 2 (2025): 312–314.
- Langgeng, Yoyok Setyo, dan Mega Fitrya Wilasari. “Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi.” *Nusantara Innovation Journal* 2, no. 2 (2023): 103–113.
- Lestari, Putri Ayu, dkk., “Analisis Yuridis Pengangkatan TNI Aktif Sebagai Penjabat Kepala Daerah.” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 12, no. 11 (2025): hlm. 31-40
- Mietzner, Marcus. “Reformasi dan Transformasi Sipil-Militer di Indonesia.” *Indonesian Political Science Review* 7, no. 3 (2021): 241.
- Potabuga, Rizky, dkk. “Analisis Yuridis Penunjukkan Anggota Polri sebagai Pelaksana Tugas Kepala Daerah.” *Lex Privatum* 15, no. 1 (2025).
- Rusmini. “Implementasi Stufenbau Theorie Hans Kelsen dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia.” *Jurnal Hukum Tri Pantang* 11, no. 1 (2025).
- Rusnan, dkk. “Bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final dan Mengikat (Suatu Kajian Filosofis)”, *Jurnal Diskresi* 3, no. 2 (2024): 152-165.
- Sari, Dwi Julica, dkk. “Perspektif Hukum terhadap Ketidaksesuaian Prinsip Reformasi dalam Undang-Undang ASN.” *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2025): 1–11.
- Silalahi, Wilma, dan Joe Aprella Indra. “Pengujian Perundang-undangan Melalui Legislative Review, Executive Review, dan Judicial Review”, *Jurnal Multilingual* 5, no. 1 (2025).
- Suهارman, Edi. “Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Daerah Menurut Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”, *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 2 (2017): 220-232.

Sulistyo, Hermawan. “Profesionalisme Polri dalam Era Reformasi: Tantangan dan Peluang.” *Jurnal Keamanan Nasional* 8, no. 1 (2022).

Surya, Ida. “Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023): 110-117.

Triangga, Rangga, dkk. “Analisis Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mengatasi Konflik Regulasi di Indonesia.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 4796–4812.

Winarno, Andrias, dkk. “Kekaburan Norma dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.” *Jurnal Media Iuris* 4, no. 3 (2021).

Zaenal Arifin, dan Adhi Putra Satria. “Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Jurnal Pro Hukum* 9, no. 1 (2020).

Tesis

Purba, Agra Putra Riady. *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus: Polres Tanah Karo)*. Tesis. Universitas Quality Berastagi. (2022).

Sayuna, Inche. *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Koran/Majalah/Portal Berita

Chaterine, Rachel Narda dan Danu Damarjati. “Jimly Tunjuk Kesalahan Perpol 10/2025: Tak Menyebut Putusan MK.” Kompas.com. 17 Desember 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/12/17/21491521/jimly-tunjuk-kesalahan-perpol-10-2025-tak-menyebut-putusan-mk>. Diakses pada 8 Januari 2026.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. “Lantik Mohammad Iqbal sebagai Sekjen DPD RI.” *dpd.go.id*, 20 Mei 2025. <https://www.dpd.go.id>.

Izzuddin, Hammam. "Mengenal Tugas Sekjen DPD yang Diduduki Komjen Muhammad Iqbal." *Tempo.co*, 28 Mei 2025. <https://www.tempo.co>.

Nugraha, Rahmat Fajar. "Guru Besar FH Unpad: Putusan MK Wajib Ditaati, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur." *Tribunnews.com*. Diakses 05 Desember 2025. <https://www.tribunnews.com>.

OPRSPITPOLDABENGKULU. "Komisi III DPR Tegaskan Perpol 10/2025 Konstitusional dan Sejalan dengan Putusan MK.". *Humas.Polri.go.id*. 14 Desember 2025, <https://humas.polri.go.id/news/detail/2210614-komisi-iii-dpr-tegaskan-perpol-102025-konstitusional-dan-sejalan-dengan-putusan-mk>. Diakses pada 25 Desember 2025

Pasha, Karisna Mega. "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *HukumOnline*, 23 Mei 2025. <https://www.hukumonline.com>. Diakses 5 November 2025

Robi. "Mahfud MD: Perpol 10/2025 Langgar Dua UU dan Putusan MK." *INANEWS.co.id*. 18 Desember 2025, <https://www.inaneews.co.id/2025/12/mahfud-md-perpol-10-2025-langgar-dua-uu-dan-putusan-mk/>. Diakses pada 25 Desember 2025

Tanpa Penulis. "KASN Monitoring Langsung Proses Seleksi Sekjen DPD RI." *bkpsdm.demakkab.go.id*. 08 September 2020. Diakses 29 November 2025, <https://bkpsdm.demakkab.go.id/2020/09/kasn-monitoring-langsung-proses-seleksi.html>. Diakses 28 November 2025.

Tanpa Penulis. "Bivitri Susanti: Perpol 10/2025 Pembangkangan Putusan Mahkamah Konstitusi." *Sindonews.com*. 19 Desember 2025. <https://nasional.sindonews.com/read/1657649/13/bivitri-susanti-perpol-102025-pembangkangan-putusan-mahkamah-konstitusi-1766106744>. Diakses 25 Desember 2025.

Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2002 Nomor 2, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2014 Nomor 182, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 5568.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2022 Nomor 143, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 6801.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2023 Nomor 141, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 6897.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2020 Nomor 68, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 6477.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2025 tentang Pengangkatan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melaksanakan Tugas Di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017
tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar
Struktur Organisasi.